

# Evaluasi Kebijakan Dalam Efektivitas Pengelolaan Dana Hibah Organisasi di Kota Bandung

Ristanti Septiani<sup>1\*)</sup> dan Gunawan Undang<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Al-Ghifari, Kota Bandung, Indonesia

<sup>2)</sup>Universitas Al-Ghifari, Kota Bandung, Indonesia

\*Corresponding author

E-mail: ristantiseptiani20@gmail.com

## ABSTRAK

Perkembangan organisasi di Kota Bandung sudah sangat eksis dan terlihat dimana-mana, apalagi organisasi kepemudaan merupakan wadah berkumpulnya para pemuda dan orang-orang untuk bertukar pikiran dalam hal kemajuan bangsa dan negara. Dalam hal ini dana hibah yang diberikan dari pemerintah Kota Bandung bisa sekali menunjang keberlangsungan giat-giat baik di tengah masyarakat. Adapun tujuan yang diteliti yakni mengenai seberapa efektifnya pengelolaan dana hibah yang diberikan kepada setiap organisasi kepemudaan khususnya di Kota Bandung. Lain hal nya dengan masalah yang ada yaitu, seperti apa pengelolaan dana hibah ini, apakah sesuai dengan yang diberikan atau tidak. Dalam hal mencari data dan informasi penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan cara mengumpulkan tulisan data-data dari jurnal, buku, serta wawancara kepada organisasi kepemudaan yaitu IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama) Kota Bandung yang menjadi salah satu organisasi yang mendapatkan dana hibah dari KNPI dan juga ada dibawahnya. Dengan adanya tulisan ini diharapkan penulis serta pembaca khususnya dapat mengetahui sejauh mana baik dan efektifnya pengelolaan dana hibah dari pemerintah daerah kepada organisasi - organisasi di Kota Bandung khususnya organisasi kepemudaan.

**Kata kunci:** Organisasi, dana hibah, kepemudaan, efektivitas

## ABSTRACT

*The development of organizations in the city of Bandung has been very existent and seen everywhere, especially youth organizations are a gathering place for youth and people to exchange ideas in terms of the progress of the nation and state. In this case, the grants given by the Bandung City government can really support the continuity of good activities in the community. The purpose of the research is on how effective the management of grant funds is given to every youth organization, especially in the city of Bandung. Another thing with the existing problem, namely, what is the management of this grant fund, whether it is in accordance with what is given or not. In terms of finding data and information, the author uses library research methods, namely by collecting written data from journals, books, and interviews with youth organizations, namely IPPNU (Nahdlatul Ulama Women's Association) Bandung City which is one of the organizations that get grants from KNPI and also under it. With this paper, it is hoped that the authors and readers, in particular, can find out how far the good and effective management of grant funds from local governments to organizations in the city of Bandung, especially youth organizations.*

**Keywords:** Organization, grants, youth, effectiveness

---

## PENDAHULUAN

Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak perintisan pergerakan Indonesia pemuda berperan aktif sebagai ujung tombak dalam mengantarkan bangsa dan Negara Indonesia yang merdeka bersatu dan berdaulat dan dalam pembangunan bangsa, pemuda memiliki fungsi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui kesadaran pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional, diperlukan pemuda yang berakhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945.

Undang undang nomor 40 tahun 2009 telah mengatur mengenai asas tujuan fungsi karakteristik dan strategi pelayanan kepemudaan peran dan tanggung jawab hak serta masyarakat dalam pembangunan kepemudaan, kordinasi kemitraan serta peran serta masyarakat dalam

pembangunan kepemudaan. Semua kegiatan yang diamanatkan dalam undang-undang nomor 40 tahun 2009 tersebut tentunya tidak terlepas dari dukungan dana dan pembiayaan.

UU no. 40 tahun 2009 tentang kepemudaan bagian dari pasal dan ayat sumber dana kepemudaan pasal 49 ayat 1 "pendanaan pelayanan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah organisasi kepemudaan, dan masyarakat." Dana hibah adalah program yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas organisasi kepemudaan dalam melaksanakan programnya. Selain itu dana hibah ini dapat digunakan sebagai penunjang untuk membantu kegiatan sosial pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat.

Dalam pencatatannya dana hibah dicatat sebesar nilai nominal hibah yang diterima dalam bentuk uang. Setiap penerimaan dana hibah OKP (Organisasi Kepemudaan) selain nilai nominal yang harus transparan disini juga harus menunjukkan tanggal terjadinya transaksi, tanggal efektif, dokumen referensi, sumber

## **METODE**

Dalam hal mencari data dan informasi penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan cara mengumpulkan tulisan data-data dari jurnal- jurnal, buku, dan tulisan yang relevan yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan dan organisasi serta wawancara kepada organisasi kepemudaan yaitu IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama) Kota Bandung yang menjadi salah satu organisasi yang mendapatkan dana hibah dari KNPI.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Evaluasi Kebijakan**

Menurut Situmorang evaluasi kebijakan dilakukan guna menemukan penyebab dari kegagalan kebijakan dan apakah kebijakan tersebut berakhir pada dampak yang dicitacitakan. Sehingga, tidak heran jika evaluasi dikatakan kegiatan fungsional yang tidak hanya dilakukan diakhir, penerimaan dana, dan keterangan ringkas. Penerimaan kas dana hibah dicatat sebesar nominal yang diberikan dan disetujui oleh pemberi hibah kepada penerima hibah. Dan penerima hibah wajib membuat laporan pertanggung jawaban untuk melaporkan realisasi penggunaan dana hibah.

Pada asas dan tujuan yang tertuang dalam UU 40 tahun 2009 kepemudaan asas-asas tersebut telah dilaksanakan oleh KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia), KNPI adalah organisasi kepemudaan yang awalnya merupakan gabungan dari kelompok Cipayung, binaan kader Golkar dan tentara melalui deklarasi yang dipimpin oleh David Napitupulu pada tanggal 23 Juli 1973.

Adapun pelaksanaan KNPI Kota Bandung terutama dalam kebermanfaatannya setiap bentuk kegiatan dan program KNPI Kota Bandung apapun bentuknya, selalu mendatangkan manfaat yang besar bagi kepentingan anggota wadah berhimpun, pemuda Indonesia dan pengembangan organisasi. Dalam data KNPI kota Bandung terdapat 97 ormas / OKP tingkat kota Bandung dan 30 KNPI Kecamatan selalu diberikan dana manfaat hibah yang telah disalurkan pemerintah kota Bandung melalui KNPI Kota Bandung untuk ormas / OKP kota Bandung, yang mana dana ini dapat dimanfaatkan lagi melalui program ormas / OKP terhadap realisasi kegiatan sosial masyarakat untuk membangun Kota Bandung kedepannya. tetapi juga pada setiap tahapan kebijakan. Kegiatan evaluasi terdiri dari spesification, measurement, analisis dan rekomendasi.

Tipe-tipe evaluasi kebijakan menurut James Anderson seperti yang dikutip oleh Situmorang, terdiri dari tiga tipe yaitu:

- a) Evaluasi merupakan kegiatan fungsional sehingga dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan.
- b) Evaluasi berfokus pada kinerja sebuah kebijakan, sehingga memilih kejujuran dan efisiensi dalam pelaksanaannya
- c) Evaluasi kebijakan sistematis yang mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan seputar kesesuaian kebijakan dengan tujuan awal, biaya-biaya yang digunakan dan keuntungan yang diraih, dan penerima keuntungan.

Evaluasi memiliki langkah-langkah, seperti yang dikatakan Edward A. Suchman. Berikut ini langkah-langkah evaluasi kebijakan: melakukan identifikasi terhadap tujuan program, analisis permasalahan, deskripsi dan standarisasi kegiatan, melakukan pengukuran pada setiap tahap perubahan, menetapkan penyebab yang menciptakan perubahan, dan indikator-indikator penentu kemunculan dampak. Dari keenam tahap tersebut, menurutnya melakukan identifikasi terhadap masalah adalah tahap paling krusial.

Tujuan pelaksanaan evaluasi adalah untuk memberikan pemahaman tentang tujuan dari sebuah kebijakan, bagaimana pelaksanaannya, dan dampak seperti apa yang didapatkan.

Terdapat tiga unsur yang harus dilakukan evaluator dalam pelaksanaan evaluasi, yaitu:

- a) Menjelaskan output kebijakan yang merupakan hasil dari kebijakan tersebut.

- b) Evaluasi berkaitan dengan kemampuan sebuah kebijakan dalam memperbaiki masalah sosial.
- c) Evaluasi berkaitan dengan setiap konsekuensi kebijakan dalam bentuk reaksi akan tindakan pemerintah.

### **Ruang Lingkup**

Menurut Lester dan Stewart, pada dasarnya, kebijakan yang dijalankan dengan maksud tertentu untuk meraih tujuan - tujuan tertentu yang berangkat dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua kebijakan meraih maksud dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian evaluasi kebijakan ditunjukan untuk melihat sebab- sebab kegagalan suatu kebijakan at au untuk mengetahui apakah kebijakan telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai "manfaat" suatu kebijakan.

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai keg iatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substantif, implementasi, dan dampak (Winarno, 2002 : 165) Berbeda dengan perumusan masalah yang bersifat prospektif, pengkajian terhadap analisis yang bersifat evaluatif lebih difokuskan pada retrospektif. Ia berusaha mengenai sejauhmana efek semula direncanakan untuk dicapai oleh kebijakan telah teralisasi, dan dampak apa yang ditimbulkan olehnya (baik dampak yang terduga maupun dampak yang tidak terduga sebelumnya). Karena itu, evaluasi kebijakan seringkali diartikan secara sempit sebagai evaluasi damak kebijakan (Wibawa, 1994:95).

### **Tahapan Evaluasi Kebijakan Publik**

Menurut Widodo (2008:131) ada 4 (empat) tahapan riset evaluasi kebijakan publik, yakni :

#### **1. Perencanaan Riset Evaluasi**

Perencanaan dalam riset evaluasi kebijakan antara lain meliputi beberapa aktivitas berikut :

- a. Menetapkan kebijakan publik dikeluarkan oleh suatu badan pemerintah dan cukup banyak macam dan jenisnya. Oleh karena itu, penetapan kebijakan publik yang akan di evaluasi menjadi penting untuk menghindari kemu ngkinan kesalahpahaman, baik bagi pelaku riset, kelompok sasaran, lembaga lain yang terlibat dalam pelaksanaan riset evaluasi kebijakan.
  - b. Menetapkan kapan hasil riset evaluasi diperlukan Batasan waktu diserahkan hasil riset harus menjadi faktor penting, baik bagi pelaku riset maupun bagi lembaga atau pihak yang membutuhkan riset. Bagi pelaku riset, batasan waktu dapat digunakan untuk menyusun jadwal kegiatan riset yang akan dilaksanakan.
  - c. Menemukan dan memformulasikan tujuan kebijakan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa tujuan evaluasi kebijakan publik adalah menentukan derajat mana suatu kebijakan program yang dibiayai oleh publik tujuannya telah dicapai. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan oleh pelaku riset kebijakan adalah menemukan dan memformulasikan tujuan kebijakan publik yang akan dievaluasi. Perlu diketahui suatu kebijakan bisa jadi memiliki banyak tujuan maka menjadi sulit untuk mengidentifikasi tujuan atau kriteria yang dibuat dalam suatu kebijakan. Bisa jadi belum terjadi kesepakatan tentang tujuan kebijakan sehingga dalam mendefiniskan tujuan bisa jadi akan sulit sehingga berakibat pada sulitnya menentukan kriteria pencapai tujuan.
  - d. Menetapkan indikator pencapaian tujuan kebijakan tujuan yang telah diformulasikan dan dipi lih untuk di evaluasi selanjutnya akan diukur dengan suatu indikator pencapaian tujuan. Pertanyaan yang akan sering diungkapkan adalah kapan dan bagaimanakah suatu tujuan kebijakan dikatakan tercapai.
  - e. Menyusun instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data perlu dirancang dan dipersiapkan sebaik mungkin. Valid tidaknya data yang dikumpulkan merupakan salah satu faktor penentu ketepatan dalam menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data. Instrumen harus dirancang sedemikian rupa serta mengacu pada indikator-indikator pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.
  - f. Menetapkan sumber dan teknik pengumpulan data semua aktor yang berkaitan dengan kebijakan yang akan di evaluasi harus dijadikan sumber data. Selain itu, cara pengumpulan data tidak hanya menggunakan wawancara saja, tetapi harus menggunkana beberapa cara, seperti dokumentasi, observasi, maupun menggunakan survey sehingga informasi yang akan didapat lebih valid dan komprehensif.
2. Pelaksanaan riset evaluasi kebijakan dilakukan secara ilmiah dengan beberapa aktivitas riset, yakni : pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan penyusunan laporan.

### **Pengertian Organisasi**

Organisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu "orgonon" dan istilah latin "organum" yang dapat berarti alat, bagian, anggota atau badan. Organisasi adalah sarana atau alat mencapai tujuan. Oleh karena itu dikatakan organisasi adalah wadah atau wahana, kegiatan orang- orang yang bekerja sama

untuk mencapai tujuan. Dalam wadah kegiatan itu setiap orang harus bekerja sama untuk mencapai tujuan. Dalam wadah kegiatan itu setiap orang harus jelas tugas wewenang dan tanggung jawabnya, hubungan dan tata kerjanya. Pengertian yang demikian disebut organisasi bersifat statis, karena sekedar hanya melihat pada strukturnya. Disamping itu terdapat pengertian organisasi yang bersifat dinamis. Dalam pengertian ini organisasi dilihat dari sudut dinamikanya, aktivitas atau tindakan daripada tata hubungan yang terjadi dalam organisasi itu, baik yang bersifat formal maupun informal.

Dalam literatur sampai saat ini, arti organisasi beraneka ragam, tergantung dari sudut mana ahli yang bersangkutan melihatnya. Berikut ini dikutip dari beberapa pendapat tentang hal itu dari berbagai ahli yaitu:

1. Dwight Waldo organisasi adalah struktur antara hubungan pribadi yang berdasarkan atas wewenang, formal dan kebiasaan-kebiasaan dalam suatu sistem administrasi.
2. John M. Gaus organisasi adalah tata hubungan antara orang-orang untuk dapat memungkinkan terciptanya tujuan bersama dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab.
3. G.R. Terry organisasi berasal dari kata "organism" yaitu struktur dengan bagian yang demikian diintegrasikan hingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan keseluruhan hubungan mereka. Jadi sebuah organisasi terdiri dari dua bagian pokok, yaitu bagian-bagian dan hubungan-hubungan.

Dari definisi organisasi menunjukkan, bahwa organisasi dapat ditinjau dari dua segi yaitu :

1. Organisasi sebagai wadah bersifat statis, dimana kegiatan-kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan. Unsur disini selain manusia, misalnya: Uang, peralatan dan bahan termasuk mesin, dan metode.
2. Organisasi sebagai proses bersifat dinamis yaitu sebagai rangkaian kegiatan dan hirarki antara orang-orang dalam suatu ikatan formal dan pencapaian tujuan. Ini dikarenakan peranan manusia dalam organisasi.

Jadi organisasi sebagai wadah kegiatan manusia adalah alat untuk mencapai tujuan, tujuan itu bermacam-macam. Karena beranekaragam macamnya tujuan itu, maka beraneka macam pula bentuk dan susunan organisasi tersebut.

### **Efektivitas Dana Hibah**

Sesuai dengan pengertian organisasi sendiri yang menyebutkan bahwa organisasi merupakan sarana/wadah untuk mencapai tujuan bersama dalam organisasi tersebut. Adapun salah satu upaya untuk mencapainya yaitu dengan memaksimalkan dana hibah yang ada.

Menurut Beni (2016: 69) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Mardiasmo (2017: 134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi

Organisasi kepemudaan di Kota Bandung diwadahi oleh KNPI Kota Bandung yang mana di dalam banyak sekali organisasi kepemudaan, salah satunya IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama) Kota Bandung. Bisa dilihat dalam UU no. 40 tahun 2009 tentang kepemudaan bagian dari pasal dan ayat sumber dana kepemudaan pasal 49 ayat 1 "pendanaan pelayanan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pemerintah daerah organisasi kepemudaan, dan masyarakat".

Dalam setiap tahunnya IPPNU Kota Bandung mendapatkan dana hibah dari pemerintah melalui KNPI yang mana jumlahnya pun berbeda-beda setiap tahunnya. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan IPPNU guna memanfaatkan dana hibah yang diberikan pemerintah antara lain :

1. Melakukan kegiatan yang di dalamnya berguna bagi masyarakat banyak, seperti IPPNU pernah membuat donor darah khusus pelajar dan masyarakat umum.
2. Melakukan banyak sosialisasi tentang moderasi keberagaman serta dilibatkan dalam kegiatan mengenai gender.
3. Melakukan kegiatan sosial dengan berbagi buku ke setiap madrasah di Kota Bandung.

Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan oleh IPPNU Kota Bandung, yang mana berarti dana hibah yang diberikan oleh pemerintah sudah efektif dilakukan oleh para penggiat organisasi kepemudaan khususnya di Kota Bandung.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka bisa disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan dalam efektivitas pengelolaan dana hibah organisasi di Kota Bandung Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi Organisasi kepemudaan di Kota Bandung diwadhahi oleh KNPI Kota Bandung yang mana di dalam banyak sekali organisasi kepemudaan, salah satunya IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama) Kota Bandung.

Berikut dengan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh IPPNU Kota Bandung, yang mana berarti dana hibah yang diberikan oleh pemerintah sudah efektif dilakukan oleh para penggiat organisasi kepemudaan khususnya di Kota Bandung..

## DAFTAR RUJUKAN

- Dr. Delly Maulana, M. D. (2019). KEBIJAKAN PUBLIK. Kota Serang: CV. AA. RIZKY.
- Dr. H. Indra Muchlis Adnan, S. P. (2013). ADMINISTRASI, ORGANISASI DAN MANAJEMEN. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Hardjanti, N. T. (2009). EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN. Skripsi.
- Maelin, E. D. (2018). Evaluasi kebijakan daerah kota serang noor 2 tahun 2012 tentang pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit masyarakat. Skripsi, 5-6.
- Santoso, P. (2010). ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK. (U. Parlindungan, Ed.) Yogyakarta: Research Center for Politics and Government.